



PENDIDIKAN

## 200 Siswa KMS Tidak Bisa ke SMP Negeri

YOGYAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 200 calon siswa yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sehat terancam tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikan ke sekolah menengah pertama negeri di Kota Yogyakarta karena tidak tertampung kuota.

"Kuota siswa baru dari keluarga pemegang KMS yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah 25 persen dari kursi yang ada atau sekitar 783 kursi," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Ashrori di Yogyakarta, Sabtu (20/6).

Ia mengemukakan, data sementara untuk calon siswa baru dari keluarga pemegang KMS yang akan masuk ke SMPN sebanyak 1.015 siswa sehingga akan ada 200 siswa yang tidak tertampung di SMPN. Namun, untuk kuota siswa dari keluarga pemegang KMS yang akan melanjutkan pendidikan ke SMAN/SMKN diperkirakan dapat tertampung.

Kuota untuk bangku SMAN/SMKN di Kota Yogyakarta adalah 969 kursi dengan jumlah siswa dari keluarga KMS tidak jauh berbeda. "Asalkan siswa pintar memilih sekolah, pasti akan dapat tertampung," katanya.

Menurut dia, dinas pendidikan akan melakukan usaha agar kuota yang tersedia dapat diisi oleh semua siswa dari keluarga peme-

gang KMS, salah satunya adalah memberikan informasi mengenai sebaran nilai. "Dari sebaran nilai yang ada, calon siswa bisa memperkirakan sekolah yang tepat sehingga peluang diterima menjadi lebih besar," ujarnya.

Sebaran nilai tersebut, lanjut Budi, baru akan diketahui saat calon siswa dari keluarga pemegang KMS tersebut mendaftarkan diri di dinas pendidikan untuk didata sebelum mendaftarkan diri ke sekolah melalui sistem *real time online* (RTO) yang akan berlangsung 29-30 Juni dengan pengumuman penerimaan dilakukan pada 1 Juli.

Ia menyatakan, bagi siswa dari keluarga pemegang KMS yang tidak dapat melanjutkan ke sekolah negeri dan harus bersekolah di swasta, tambah Budi, tidak akan kehilangan haknya sebagai pemegang KMS karena tetap mendapat jaminan pendidikan daerah (JPD). "Kami bahkan akan memberikan hak siswa dari keluarga pemegang KMS yang bersekolah di luar Kota Yogyakarta," katanya.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta telah meminta kepada sekolah swasta untuk tidak menarik biaya pendidikan yang terlalu besar karena akan membebani siswa dari keluarga pemegang KMS. Pendataan calon siswa dari keluarga pemegang KMS ke dinas pendidikan pada 22-27 Juni adalah syarat wajib. (ANT)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005